Research Review
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol. 5, No. 2, November 2026 ISSN: 29622743

Pengembangan Objek Wisata Danau Perintis di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango

(Development of the Danau Perintis Tourism Object in Suwawa District, Bone Bolango Regency)

Findi Cahyani Hongi[1], Asna Aneta[2], Rustam Tohopi[3]
[1,2,3]Adminitstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
findihongi@gmail.com[1], asnaatiek.aneta@ung.ac.id[2], rustam@ung.ac.id[3]

Article Info

Article history:

Received: 13 November 2026
Revised: 25 November 2026
Accepted: 25 November 2026

Keywords:

Danau Perintis Tourism
Tourism Development
Management Functions

Kata Kunci:

Wisata Danau Perintis
Pengembangan Pariwisata
Fungsi Manajemen

Abstract

This research aims to analyze and describe the development of the Danau Perintis tourism object in Suwawa Subdistrict, Bone Bolango Regency, using the management theory indicators proposed by George Terry: planning, organizing, actuating, and controlling. This research is motivated by the suboptimal development of the Danau Perintis tourism object in Suwawa Subdistrict, Bone Bolango Regency, despite its significant potential as a natural tourism destination. This condition is reflected in the limited collaboration among the management and the village, as well as the lack of supporting facilities, ineffective promotoin, and low community participation in torism management. The research method employed is a qualitative approach, specifically a descriptive qualitative design. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The result indicate that the development of the Danau Perintis tourism objectb has been implemented through teh aspects of planning, organizing, actuating, and controlling. However, its development has not been optimal due to ongoing obstacles in inter-stakeholder coordination, limited facilities and infrastructure, low community participation, and suboptimal supervision.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengembangan objek wisata Danau Perintis di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, dengan menggunakan indikator teori manajemen George R. Terry yang meliputi perencanaan *(planning)*, pengorganisasian *(*organizing), pelaksanaan/penggerakan *(actuating)*, dan pengawasan *(controlling)*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengembangan objek wisata Danau Perintis di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, meskipun memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam. Kondisi ini tercermin dari masih terbatasnya kerja sama antara pihak pengelola dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan provinsi sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal, serta kurangnya fasilitas pendukung, promosi yang belum efektif, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Objek Wisata Danau Perintis telah dilaksanakan melalui aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Corresponding Author:

Findi Cahyani Hongi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Gorontalo
findihongi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya yang berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai sektor pariwisata. Dengan wilayah yang terdiri atas lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia memiliki berbagai potensi wisata alam, budaya, dan sejarah yang tersebar di seluruh daerah. Kekayaan tersebut menjadi salah satu modal penting dalam mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja. Namun, besarnya potensi pariwisata yang dimiliki belum sepenuhnya diimbangi dengan pengelolaan dan pengembangan yang optimal. Keterbatasan aksesibilitas, sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan destinasi masih menjadi sejumlah tantangan dalam pengembangan pariwisata di berbagai daerah (Samadi et al., 2025).

Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional maupun daerah karena mampu memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat melalui terbukanya kesempatan usaha dan lapangan pekerjaan. Menurut Ndjurumbaha et al. (2024), sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik di sekitar kawasan wisata maupun pada sektor ekonomi lain yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan pariwisata. Dengan demikian, pengembangan pariwisata merupakan salah satu instrumen pembangunan daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi secara luas apabila dikelola secara terencana dan berkelanjutan (Tohopi et al., 2025).

Pentingnya pengembangan sektor pariwisata juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang mengarahkan pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, melestarikan lingkungan hidup, serta mengembangkan kebudayaan. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah menekankan bahwa kegiatan ekowisata tidak hanya berorientasi pada rekreasi, tetapi juga mencakup pendidikan, peningkatan pemahaman masyarakat, konservasi sumber daya alam, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan (Djali et al., 2024).

Dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan, menyediakan fasilitas pendukung, melakukan pembinaan, serta mengoordinasikan berbagai pihak yang terlibat. Pengembangan objek wisata membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang sistematis agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal. Kebijakan pengembangan pariwisata juga perlu melibatkan masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah sebagai unsur yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan. Pitana dan Gayatri menjelaskan bahwa terdapat tiga pilar utama dalam sistem pariwisata, yaitu masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Ketiganya memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan pengembangan destinasi wisata. Oleh karena itu, koordinasi dan kerja sama antarpemangku kepentingan menjadi aspek penting dalam mewujudkan pengembangan pariwisata yang efektif (Abdussamad & Hurudji, 2022).

Salah satu daerah yang memiliki potensi pengembangan pariwisata adalah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Daerah ini memiliki berbagai objek wisata alam yang dapat dikembangkan sebagai destinasi unggulan, salah satunya adalah Danau Perintis yang terletak di Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bone Bolango juga didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011–2031. Peraturan tersebut menjadi landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi, serta kemajuan sektor pariwisata (Podungge & Aneta, 2020).

Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah dapat dilihat melalui penerimaan retribusi pelayanan rekreasi dan olahraga serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan data Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2025, penerimaan retribusi pelayanan rekreasi dan olahraga mengalami perubahan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, penerimaan tercatat sebesar Rp102.683.867,00 dengan proporsi 0,14% terhadap PAD. Selanjutnya, pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp325.373.005,00 atau 0,36%, kemudian pada tahun 2022 sebesar Rp235.968.510,00 atau 0,26%. Pada tahun 2023 penerimaan mencapai Rp312.174.001,00 dengan proporsi 0,25%, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp370.696.482,00 atau 0,35%. Data tersebut menunjukkan adanya potensi kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah, meskipun proporsinya terhadap PAD masih relatif kecil. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata secara lebih optimal agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah (Tui et al., 2023).

Potensi pariwisata Kabupaten Bone Bolango juga tercermin dari data kunjungan wisatawan tahun 2025 yang menunjukkan keberadaan sejumlah destinasi wisata dengan tingkat kunjungan yang beragam. Salah satu objek wisata yang memiliki jumlah kunjungan cukup tinggi adalah Danau Perintis di Kecamatan Suwawa. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Danau Perintis tercatat sebanyak 12.300 orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Danau Perintis memiliki daya tarik yang cukup besar dan berpotensi dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bone Bolango. Tingginya jumlah kunjungan tersebut sekaligus menjadi peluang bagi pemerintah daerah dan pengelola untuk meningkatkan kualitas pengelolaan serta mengoptimalkan potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari aktivitas pariwisata (Nurlaeli & Syahputra, 2022).

Meskipun memiliki potensi yang cukup besar, pengembangan objek wisata Danau Perintis masih menghadapi sejumlah permasalahan. Berdasarkan hasil observasi awal, pengembangan destinasi tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah masih terbatasnya kerja sama dan koordinasi antara pihak pengelola dengan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan dalam mendukung pelaksanaan program pengembangan pariwisata. Pengembangan Danau Perintis masih didominasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango, sehingga keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengembangan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan destinasi wisata membutuhkan koordinasi yang lebih baik agar setiap pihak dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal (Afrisal, 2022).

Permasalahan lainnya berkaitan dengan keterbatasan fasilitas pendukung, penataan kawasan wisata, dan promosi destinasi yang belum efektif. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam memberikan kenyamanan kepada wisatawan sekaligus meningkatkan daya saing suatu destinasi. Selain itu, pengembangan Danau Perintis juga masih menghadapi kendala dari aspek sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat yang masih terbatas, kurangnya tenaga kerja terampil di bidang pariwisata, serta belum optimalnya pengolahan dan pengembangan produk berbahan baku lokal menjadi tantangan dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi kawasan wisata. Keterbatasan tenaga kerja kreatif juga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha dan memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari aktivitas pariwisata (Amalia & Rivai, 2022).

Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata menjadi persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian. Padahal, masyarakat yang berada di sekitar kawasan wisata merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung keberlanjutan pengembangan destinasi. Keterlibatan masyarakat tidak hanya diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan wisata, tetapi juga dalam proses perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan. Belum optimalnya partisipasi masyarakat menyebabkan manfaat ekonomi dari keberadaan Danau Perintis belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat setempat. Padahal, pengembangan destinasi wisata diharapkan mampu membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Mopili et al., 2025).

Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pengembangan objek wisata tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi alam yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pengelola dalam menjalankan fungsi manajemen. Dalam penelitian ini, fungsi manajemen George R. Terry digunakan sebagai landasan analisis yang mencakup empat aspek, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan atau penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling). Keempat fungsi tersebut menjadi bagian penting dalam mengarahkan seluruh sumber daya dan kegiatan organisasi agar tujuan pengembangan objek wisata dapat tercapai secara efektif dan efisien. Melalui fungsi perencanaan, pengembangan diarahkan pada penetapan program dan sasaran yang jelas. Pengorganisasian

berkaitan dengan pembagian tugas serta koordinasi antarpihak, sedangkan pelaksanaan mencakup upaya menggerakkan sumber daya untuk menjalankan program yang telah ditetapkan. Sementara itu, pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengembangan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditentukan (Makian et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, pengembangan Objek Wisata Danau Perintis di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, menjadi persoalan yang penting untuk dikaji. Potensi kunjungan wisatawan yang cukup tinggi belum sepenuhnya didukung oleh kualitas pengelolaan, ketersediaan fasilitas, koordinasi antarpemangku kepentingan, promosi, serta partisipasi masyarakat yang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengembangan objek wisata Danau Perintis berdasarkan fungsi manajemen George R. Terry, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengembangan objek wisata sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah, pihak pengelola, serta masyarakat dalam mengoptimalkan pengembangan Danau Perintis sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Yusuf et al., 2025).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian diarahkan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena pengembangan objek wisata Danau Perintis di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh informasi berdasarkan kondisi nyata di lapangan, khususnya mengenai proses pengembangan objek wisata yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan atau penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) berdasarkan teori manajemen George R. Terry (1930). Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menguraikan kondisi, proses, serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan objek wisata tersebut secara sistematis dan sesuai dengan fakta empiris (Himam et al., 2026).

Penelitian dilaksanakan di objek wisata Danau Perintis, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Lokasi ini dipilih karena Danau Perintis merupakan salah satu potensi wisata alam daerah yang memiliki peluang untuk dikembangkan, tetapi dalam pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan koordinasi antarpihak yang terlibat, sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai, promosi yang belum optimal, serta partisipasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini berlangsung kurang lebih selama lima bulan, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, hingga penyusunan laporan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Kehadiran peneliti diperlukan untuk mengamati kondisi objek penelitian, melakukan wawancara dengan informan, serta mengumpulkan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti berupaya memperoleh informasi secara objektif berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan pandangan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan objek wisata Danau Perintis. Informan penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan yang relevan dengan pengembangan objek wisata Danau Perintis. Informan berjumlah tujuh orang, yang terdiri atas Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango, Adyatama Muda Kepariwisataan, Pengolah Data dan Informasi, dua orang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta dua orang pengunjung.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pertama, wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk memperoleh informasi secara mendalam dari para informan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian, sedangkan wawancara tidak terstruktur memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban dan informasi yang disampaikan informan. Kedua, observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap kondisi dan aktivitas di kawasan objek wisata Danau Perintis. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan pengembangan wisata, termasuk kondisi sarana dan prasarana serta aktivitas pihak-pihak yang terlibat. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen tertulis maupun dokumentasi visual yang berkaitan dengan penelitian, seperti laporan kegiatan, dokumen kebijakan, foto, gambar, serta dokumentasi sarana dan prasarana pendukung objek wisata.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yang saling berkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengelompokan data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kebutuhan dan fokus penelitian. Pada tahap ini, informasi hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi dipilah serta

diklasifikasikan berdasarkan empat aspek pengembangan wisata menurut George R. Terry. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian yang sistematis dan mudah dipahami, sehingga pola dan keterkaitan antartemuan dapat diidentifikasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses merumuskan makna temuan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan disusun secara bertahap dengan tetap memperhatikan kesesuaian antara informasi yang diperoleh dan fokus penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Objek Wisata Danau Perintis di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, telah dilakukan melalui empat fungsi manajemen George R. Terry, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan atau penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Meskipun berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata bersama pihak terkait, pengembangan objek wisata tersebut belum berjalan secara optimal. Kondisi ini terutama berkaitan dengan koordinasi antarpihak, keterbatasan sarana dan prasarana, belum optimalnya keterlibatan masyarakat, serta pelaksanaan pengawasan yang masih perlu ditingkatkan (Saraswati, 2021).

3.1 Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan pengembangan Objek Wisata Danau Perintis dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango melalui identifikasi potensi dan kebutuhan kawasan wisata. Identifikasi tersebut mencakup kondisi sarana dan prasarana, aksesibilitas, kebersihan lingkungan, serta daya tarik wisata yang berpotensi dikembangkan. Penyusunan program kerja dilaksanakan melalui survei lapangan, rapat internal, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar program yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual kawasan wisata.

Perencanaan pengembangan Objek Wisata Danau Perintis memperlihatkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya membangun arah pengembangan berdasarkan potensi dan kebutuhan kawasan. Keterlibatan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pelaku UMKM dalam memberikan masukan merupakan bagian penting dari proses perencanaan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kontribusi dari masyarakat yang berada di sekitar kawasan wisata. Masukan dari pelaku UMKM, misalnya, berkaitan dengan kebutuhan tempat usaha, fasilitas pendukung, serta peluang peningkatan aktivitas ekonomi apabila jumlah kunjungan wisatawan meningkat (Chairunnisa et al., 2025).

Penentuan prioritas program dalam jangka pendek, menengah, dan panjang juga menunjukkan adanya upaya untuk mengembangkan Danau Perintis secara bertahap. Prioritas jangka pendek diarahkan pada pembenahan fasilitas dasar dan kebersihan kawasan, sedangkan jangka menengah difokuskan pada pengembangan sarana pendukung, aksesibilitas, dan pemberdayaan UMKM. Adapun rencana jangka panjang diarahkan pada penguatan identitas atau *branding* Danau Perintis sebagai salah satu destinasi unggulan daerah. Pembagian tahapan tersebut penting karena pengembangan destinasi wisata membutuhkan proses yang berkelanjutan dan tidak dapat hanya mengandalkan pembangunan fasilitas dalam waktu singkat.

Upaya perencanaan diwujudkan melalui revitalisasi dan penataan fasilitas, antara lain pembangunan gazebo, penyediaan area berkemah (*camping ground*), pemasangan lampu hias, penambahan spot foto Kapal Tembaga, serta penyediaan wahana sepeda air dan berbagai objek foto lainnya. Penataan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus memperkuat daya tarik Danau Perintis bagi wisatawan. Selain itu, kegiatan seperti festival produk milenial yang melibatkan unsur pariwisata, UMKM, dan hiburan masyarakat turut dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi promosi. Pemanfaatan media sosial dan pencantuman Danau Perintis dalam platform pariwisata resmi juga mendukung penyebarluasan informasi mengenai destinasi tersebut.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan Danau Perintis telah memperhatikan potensi kawasan dan kebutuhan pengunjung. Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan penguatan kerja sama dengan pemerintah desa, pelaku UMKM, pihak swasta, dan komunitas pariwisata. Apabila dikaitkan dengan fungsi perencanaan menurut George R. Terry, kegiatan identifikasi kebutuhan dan penentuan prioritas program telah menunjukkan adanya arah pengembangan yang cukup jelas. Meskipun demikian, kesinambungan kerja sama dan dukungan sumber daya tetap diperlukan agar rencana yang telah disusun dapat direalisasikan secara konsisten.

3.2 Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dalam pengembangan Objek Wisata Danau Perintis melibatkan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pengelola wisata, kelompok sadar wisata, serta masyarakat sekitar. Dinas Pariwisata berperan sebagai pihak utama yang mengoordinasikan program pengembangan, sedangkan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa membantu koordinasi di wilayah serta membangun komunikasi dengan masyarakat. Pengelola wisata terlibat secara langsung dalam

kegiatan operasional kawasan, sementara masyarakat berpartisipasi melalui kegiatan ekonomi dan dukungan terhadap pengelolaan lingkungan wisata (Eky et al., 2025).

Keterlibatan masyarakat terlihat melalui aktivitas usaha kuliner, penyewaan fasilitas, dan pengelolaan parkir. Aktivitas tersebut memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar sekaligus mendukung keberadaan kawasan wisata. Dari aspek fasilitas, Danau Perintis telah memiliki area parkir, gazebo, tempat duduk, dan akses jalan menuju lokasi. Namun, sejumlah fasilitas masih memerlukan peningkatan agar kenyamanan pengunjung dapat lebih maksimal. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam penyediaan dan perbaikan sarana prasarana secara menyeluruh.

Berdasarkan temuan tersebut, pengorganisasian telah menunjukkan adanya pembagian peran dan keterlibatan berbagai unsur dalam pengembangan wisata. Akan tetapi, koordinasi antarpihak belum sepenuhnya berjalan optimal. Dalam perspektif George R. Terry, pengorganisasian tidak hanya berkaitan dengan pembagian tugas, tetapi juga penataan hubungan kerja dan sumber daya agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah. Oleh karena itu, pembagian tanggung jawab yang telah dilakukan perlu diperkuat melalui koordinasi yang berkesinambungan sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan setiap pihak dapat menjalankan perannya secara efektif.

3.3 Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan pengembangan Objek Wisata Danau Perintis dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, promosi, pelayanan informasi kepada pengunjung, serta pemeliharaan fasilitas wisata. Sosialisasi kepada masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan mendukung pengembangan kawasan wisata. Sementara itu, promosi dilakukan melalui media sosial resmi Dinas Pariwisata, publikasi konten visual, dan kegiatan pariwisata daerah. Pengelola juga memberikan informasi secara langsung kepada pengunjung mengenai fasilitas, aturan, dan daya tarik yang tersedia di kawasan Danau Perintis (Zendrato et al., 2025).

Meskipun kegiatan pelaksanaan telah berjalan, penelitian menemukan bahwa belum tersedia standar operasional prosedur (SOP) tertulis yang secara khusus mengatur tata cara komunikasi dan pelayanan kepada pengunjung. Pelayanan informasi masih mengandalkan pengalaman petugas dan arahan dari pengelola. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya didukung oleh pedoman operasional yang baku. Akibatnya, pelaksanaan tugas dan pelayanan berpotensi berbeda sesuai dengan situasi dan pemahaman masing-masing petugas.

Jika ditinjau melalui fungsi penggerakan George R. Terry, pelaksanaan merupakan proses mengarahkan dan mendorong pihak-pihak yang terlibat agar menjalankan tugas sesuai tujuan organisasi. Kegiatan sosialisasi dan promosi menunjukkan adanya upaya menggerakkan masyarakat serta memperkenalkan potensi wisata kepada publik. Namun, belum tersedianya SOP tertulis menjadi salah satu aspek yang perlu diperbaiki. Penyusunan pedoman operasional diperlukan untuk memperjelas mekanisme pelayanan, komunikasi, pembagian tugas, dan pelaksanaan kegiatan sehingga pengembangan Danau Perintis dapat berlangsung lebih terarah dan konsisten.

3.4 Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan terhadap pengembangan Objek Wisata Danau Perintis dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango melalui monitoring secara berkala, baik dengan kunjungan langsung ke lokasi maupun melalui laporan dari pengelola. Pengawasan mencakup pengelolaan fasilitas, kebersihan kawasan, keamanan, serta pelayanan kepada pengunjung. Selain itu, laporan kegiatan yang diterima dari pengelola digunakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan (Hidayat et al., 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengembangan wisata masih ditemukan beberapa kendala teknis, seperti keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, kurang optimalnya pemeliharaan fasilitas, serta koordinasi yang belum maksimal. Kendala tersebut ditindaklanjuti melalui evaluasi dan koordinasi langsung dengan pihak pelaksana agar dapat dilakukan perbaikan. Meskipun demikian, pengawasan masih membutuhkan peningkatan, terutama dalam hal intensitas monitoring, evaluasi secara sistematis, dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang ditemukan.

Dalam perspektif fungsi pengawasan George R. Terry, pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring yang dilakukan Dinas Pariwisata menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah berjalan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala teknis dan kebutuhan untuk memperkuat evaluasi. Dengan demikian, pengawasan perlu dilakukan secara lebih berkelanjutan melalui koordinasi lintas sektor, pelaporan yang teratur, serta tindakan korektif yang jelas agar kualitas pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata dapat terus ditingkatkan (Taimenas et al., 2021).

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengembangan Objek Wisata Danau Perintis telah dilaksanakan melalui empat fungsi manajemen, tetapi pencapaiannya belum optimal. Perencanaan telah diwujudkan melalui penataan fasilitas dan promosi, pengorganisasian telah melibatkan

berbagai pihak, pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi dan pelayanan informasi, sedangkan pengawasan dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi. Kendala utama yang masih dihadapi meliputi koordinasi antarpihak yang belum maksimal, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, belum tersedianya SOP tertulis, serta perlunya penguatan pengawasan. Oleh karena itu, pengembangan Danau Perintis memerlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola, pelaku usaha, dan masyarakat agar potensi wisata dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan objek wisata Danau Perintis di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan objek wisata tersebut telah dilaksanakan melalui empat fungsi manajemen menurut George R. Terry, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan atau penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango bersama pihak-pihak terkait, pengembangan objek wisata Danau Perintis secara keseluruhan masih belum berjalan secara optimal.

Pada aspek perencanaan (*planning*), pengembangan objek wisata Danau Perintis telah dilakukan melalui berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas destinasi wisata. Upaya tersebut diwujudkan melalui revitalisasi fasilitas wisata, penambahan wahana pendukung, penyelenggaraan kegiatan promosi, serta pemanfaatan media sosial dan platform pariwisata sebagai sarana penyebarluasan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan telah memiliki arah dan tujuan yang cukup jelas dalam mendukung peningkatan daya tarik objek wisata Danau Perintis.

Pada aspek pengorganisasian (*organizing*), pembagian tugas dan tanggung jawab telah melibatkan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pengelola wisata, dan masyarakat sekitar. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan adanya upaya membangun kerja sama dalam proses pengembangan destinasi wisata. Namun demikian, koordinasi dan kerja sama antarpihak masih belum terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pengembangan objek wisata masih lebih banyak didominasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango, sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan keterlibatan seluruh pihak agar tanggung jawab pengembangan dapat dilaksanakan secara lebih terpadu.

Pada aspek pelaksanaan atau penggerakan (*actuating*), pengembangan objek wisata Danau Perintis telah diwujudkan melalui penyelenggaraan festival, kegiatan hiburan masyarakat, pengembangan fasilitas pendukung, serta promosi melalui media sosial. Berbagai kegiatan tersebut merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong kunjungan wisatawan. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan keterlibatan masyarakat, belum berkelanjutannya kegiatan promosi, serta belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pengelolaan objek wisata. Dengan demikian, pelaksanaan program pengembangan masih memerlukan penguatan dari segi partisipasi masyarakat, kesinambungan promosi, dan standar pengelolaan.

Sementara itu, pada aspek pengawasan (*controlling*), kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan serta pengembangan objek wisata Danau Perintis telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan pengembangan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, pengelolaan yang belum konsisten, serta kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pengawasan perlu diperkuat agar pelaksanaan program dapat dievaluasi secara berkelanjutan dan berbagai permasalahan dalam pengelolaan dapat ditangani dengan lebih baik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan objek wisata Danau Perintis telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, belum optimalnya koordinasi antarpihak, terbatasnya keterlibatan masyarakat, belum berkelanjutannya promosi, belum tersedianya SOP pengelolaan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam proses pengembangannya. Dengan demikian, optimalisasi pengembangan objek wisata Danau Perintis memerlukan pengelolaan yang lebih terpadu, kerja sama berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat, serta penguatan pelaksanaan dan pengawasan agar potensi wisata yang dimiliki dapat dikembangkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan objek wisata Danau Perintis di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam rangka mengoptimalkan pengembangan destinasi wisata tersebut.

Pertama, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, khususnya Dinas Pariwisata, perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama secara berkelanjutan dengan pemerintah provinsi, pemerintah desa, pihak swasta, serta masyarakat setempat. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pengembangan objek wisata dapat dilaksanakan secara terpadu, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang lebih jelas serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Kedua, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung perlu menjadi perhatian dalam pengembangan objek wisata Danau Perintis. Beberapa fasilitas yang perlu ditingkatkan meliputi akses jalan, area parkir, fasilitas kebersihan, tempat ibadah, serta fasilitas rekreasi lainnya. Penyediaan dan perbaikan fasilitas tersebut diharapkan dapat menciptakan kenyamanan dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi para pengunjung.

Ketiga, promosi objek wisata Danau Perintis perlu dilakukan secara lebih aktif, kreatif, dan berkelanjutan. Pemanfaatan media sosial, penyelenggaraan kegiatan atau *event* pariwisata, kerja sama dengan *influencer*, serta berbagai bentuk promosi digital lainnya perlu dioptimalkan agar informasi mengenai potensi dan daya tarik Danau Perintis dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Keempat, pemerintah daerah dan pengelola wisata perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kapasitas tersebut terutama diarahkan pada kemampuan pengelolaan destinasi wisata, pelayanan terhadap wisatawan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis pariwisata. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat tidak hanya mendukung pengelolaan objek wisata, tetapi juga dapat membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Secara keseluruhan, pelaksanaan saran tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan dan pengembangan objek wisata Danau Perintis sehingga potensi wisata yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

REFERENSI

Abdussamad, J., & Hurudji, W. P. A. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataan Di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, *9*(2). https://doi.org/10.37606/publik.v9i2.299

Afrisal, A. F. (2022). Tata Kelola Kolaboratif dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata. *Journal of Social Science*, *3*(6), 1270. https://doi.org/10.46799/jss.v3i6.478

Amalia, F., & Rivai, A. (2022). Pembangunan Wilayah Melalui Destinasi Wisata di Kota Tanjungbalai. *International Journal of Science, Technology & Management*, *3*(5). https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i5.601

Chairunnisa, Y., Faradillah, K. R., & Kurniawan, M. N. R. (2025). Integrasi Edukasi dan Kesehatan sebagai Pilar Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan: Studi Kasus Desa Tosari Kabupaten Pasuruan. *Journal of Dedication in Community (JoDiC)*, *3*(1).

Djali, S. N. A. N., Nani, Y. N., & Tohopi, R. (2024). Strategi Pengembangan Objek Wisata Pemandian Lombongo Kabupaten Bone Bolango. *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, *2*(2), 491-499.

Eky, F. S., Meko, P. M., Mantolas, M. C., & Eky, E. F. (2025). Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Budaya Masyarakat Lokal (Studi Kasus Desa Wisata Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, *30*(1).

Hidayat, A., Sutikno, C., Pribadi, I. A. P., Amanda, A., & Milata, C. I. (2025). Manajemen Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengembangan Wisata Bukit Pangonan Indah di Desa Karang Gintung Kabupaten Banyumas. *Journal Of Community Development and Disaster Management*, *7*(1). https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6828

Himam, M. K., Anam, S., & Nashrullah. (2026). Teknik Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif: Strategi Dan Implementasi. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, *5*(2), 1688–1696.

Makian, R. B., Didi, L., & Arsyiah, W. O. (2025). Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Pariwisata Sudi Wisata Pantai Lagunci Desa Bahari 3 Buton Selatan. *Administratio: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *14*(1).

Mopili, A. M., Tahir, A., & Abdussamad, Z. (2025). Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Bone Bolango: Studi Kasus Objek Wisata Pantai Kurenai. *Research Review*, *4*(1). https://doi.org/10.1080/15411796.2011.585906

Ndjurumbaha, V. Y., Tiwu, M. I., & Ballo, F. W. (2024). Peran sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, *2*(3), 46-55.

Nurlaeli, S., & Syahputra, M. H. I. (2022). Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Asahan (Kasus Danau Kelapa Gading). *NAWASENA: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, *1*(2).

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011–2031.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata.

Podungge, A. W., & Aneta, A. (2020). Profesionalisme Pegawai Ditinjau Dari Aspek Pengorganisasian Dalam Pelayanan Publik. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, *9*(1), 55. https://doi.org/10.31314/pjia.9.1.55-65.2020

Samadi, F., Aneta, A., & Aneta, Y. (2025). Tata Kelola Pariwisata di Kota Gorontalo (Studi Kasus Benteng Otonaha dan Tamendao Beach). *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(4). https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4351

Saraswati, U. (2021). Pariwisata Pedesaan: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Proceedings of the 6th International Conference on Education & Social Sciences (ICESS 2021)*, *578*(Icess). https://doi.org/10.2991/assehr.k.210918.065

Taimenas, E. D., Malelak, M. L., & Manafe, P. J. C. (2021). Implementasi UU No.10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dalam Kegiatan Pengembangan Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020)*, *544*(10). https://doi.org/10.2991/assehr.k.210424.011

Terry, G. R. (1930). *Fundamentals of management.* Society of American Foresters.

Tohopi, R., Ngabito, F. M., & Mukdin, N. B. (2025). Implementasi Community-Based Tourism sebagai Strategi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, *11*(1). https://doi.org/10.23887/jiis.v11i1.94077

Tui, F. P., Ilato, R., Isa, R., Abdussamad, J., Bobihu, A., & Humaini, M. (2023). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, *10*(1). https://doi.org/10.37606/publik.v10i1.682

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Yusuf, P. A., Alam, H. V., & Mendo, A. Y. (2025). Pengaruh Reformasi Birokrasi Dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, *7*(3).

Zendrato, A., Halawa, O., Waruwu, R. M. P., & Telaumbanua, E. (2025). Pengaruh Pengembangan Organisasi Terhadap Peningkatan Pengunjung. *Jurnal Ilmu Manajemen Saburai*, *11*(02).